

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengesahan otonomi daerah mulai saat tahun 2001, beriringan dengan diterapkannya undang-undang mengenai otonomi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah, merupakan pintu yang menyediakan peluang untuk setiap kabupaten/kota guna menemukan, mengembangkan dan melakukan pengelolaan sumber daya potensial guna mengembangkan pembangunan daerah. Pemerintah daerah mempunyai wewenang guna mengurus sendiri keperluan pemerintahannya atas dasar asas otonomi tersebut. Selain itu, pemerintah daerah pun berwenang untuk membuat arah pembangunan daerahnya sendiri mulai dari menyusun perencanaan hingga pengelolaan sumber daya daerah yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Dengan adanya otonomi ini, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab besar untuk memajukan wilayahnya sendiri.

Pemerintah daerah dirasa lebih tahu mengenai seperti apa potensi yang dimiliki daerahnya untuk di kelola dan dikembangkan. Masyarakat beranggapan bahwa setiap daerah perlu lebih mengenal potensi pembangunannya dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat dalam pekerjaan pembangunan daerah, agar pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat dan optimal. Keberhasilan atau kegagalan pembangunan bergantung pada kemampuan

pemerintah daerah untuk mengumpulkan, mengelola, dan melaksanakan strategi pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, perlu adanya rencana dalam pembangunan daerah agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan cita-cita masyarakat setempat. Jika jalannya prioritas pembangunan daerah bersama potensinya tidak seirama, penggunaan sumber daya yang ada berubah tidak efektif juga bisa memunculkan perlambatan tumbuhnya ekonomi daerah. Perkembangan ekonomi tersebut bisa kita lihat lewat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau indeks harga konsumen reguler, di mana angka positif berarti pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika angka negatif berarti menunjukkan bahwa perekonomian sedang turun, yang mana ini merupakan salah satu masalah dalam pembangunan daerah.

Salah satu permasalahan atau isu strategis dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Kapuas yang dimuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 ialah produk-produk daerah bermutu tinggi masih belum jelas, belum berkembang secara optimal. Menurut Arsyad (2005:108) dalam (Sapriadi & Hasbiullah, 2015), permasalahan utama pembangunan daerah yaitu penekanan pada kebijakan pembangunan yang berbasis keunikan (*endogenous development*) wilayah yang berkaitan dalam memanfaatkan peluang sumber daya manusia, kelembagaan juga material lokal (daerah). Oleh karena itu, dalam menuju hasil pembangunan daerah lewat proses tumbuhnya ekonomi, diperlukan ketentuan pembangunan dengan berbasis dalam pembangunan endogen lalu memanfaatkan peluang sumber daya lokal yang dapat memacu kerja ekonomi. Dengan demikian berdasarkan pemaparan tersebut maka dibutuhkan observasi lebih dalam sebagai pengidentifikasian sektor ekonomi dan komoditas

yang berkualitas, yang merupakan sumber daya lokal yang sesuai untuk pembangunan daerah dan diharapkan dapat mendukung pembangunan Kabupaten Kapuas.

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan atas latar belakang itu, studi tersebut diarahkan agar menjawab pertanyaan rumusan masalah yaitu:

1. Sektor ekonomi apa yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Kapuas?
2. Komoditas sektor ekonomi unggulan apa yang cocok untuk dikembangkan guna mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Kapuas?

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Tujuan dari penyusunan penelitian ini yaitu:

1. Menentukan sektor ekonomi unggulan pada Kabupaten Kapuas.
2. Menentukan komoditas sektor ekonomi unggulan yang cocok dalam pengembangan.

Sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Teridentifikasinya sektor ekonomi unggulan pada Kabupaten Kapuas.
2. Teridentifikasinya komoditas sektor ekonomi unggulan yang cocok untuk dikembangkan.

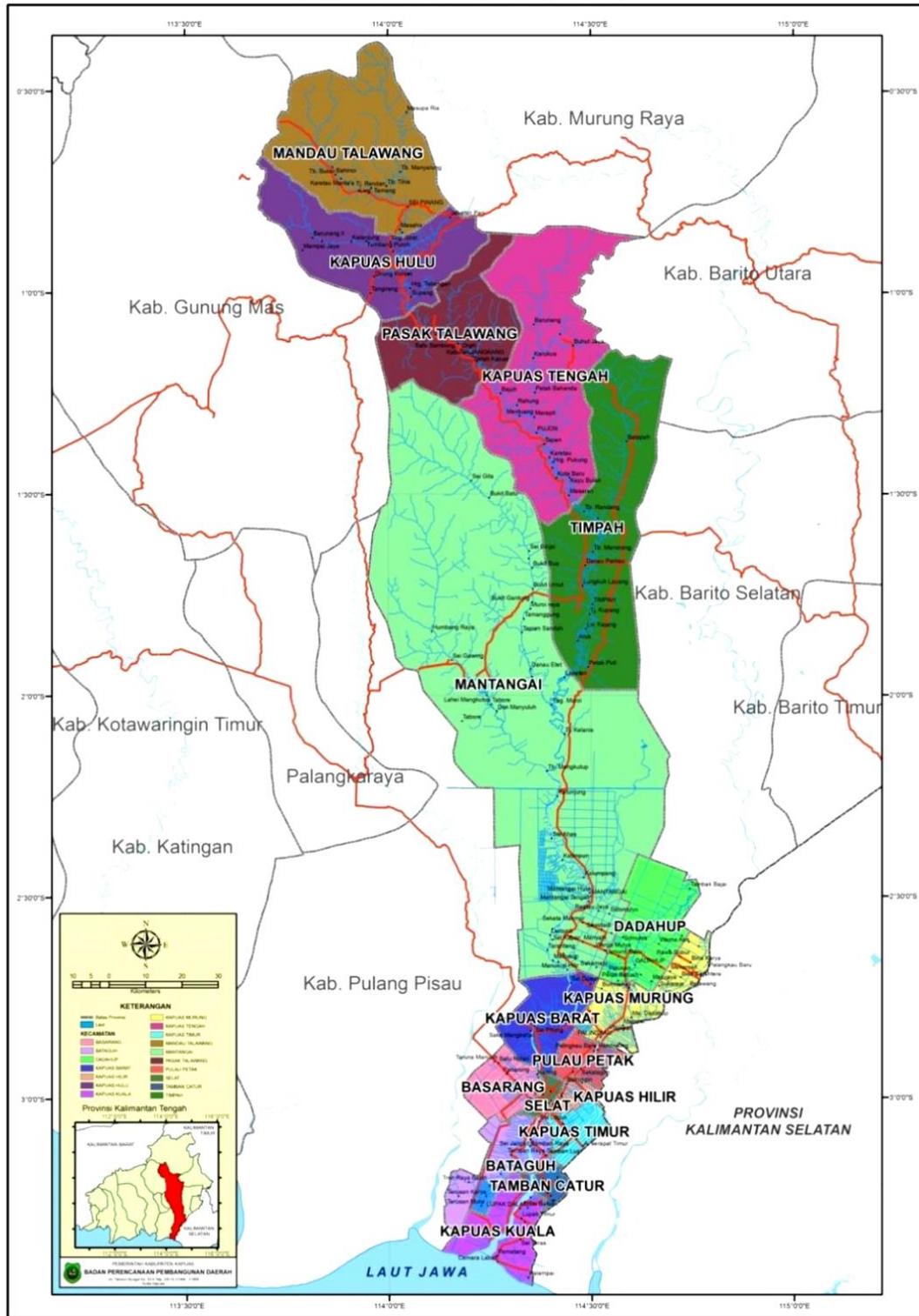
1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pelajaran tentang perencanaan daerah juga kota pada bidang ekonomi daerah khususnya dalam menentukan sektor yang dominan untuk mendorong pembangunan daerah, dalam hal ini Kabupaten Kapuas. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa membagikan kritik yang membangun untuk pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi unggulan dan komoditasnya guna mendukung pembangunan wilayah.

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pada observasi yaitu daerah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kapuas memiliki luas wilayah sebesar 17.070,383 Km² atau setara dengan 1.707.039,3 Ha. Kabupaten Kapuas terbagi menjadi 17 kecamatan yaitu Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Selat, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Basarang, Kecamatan Kapuas Hilir, Kecamatan Pulau Petak, Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Dadahup, Kecamatan Kapuas Barat, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Kapuas Hulu, dan Kecamatan Mandau Talawang.



Gambar 1. 1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Kapuas

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas, 2020.

1.5.2. Batasan Penelitian

Didasarkan atas rumusan masalah yang dijabarkan, kajian ini mempunyai ruang lingkup sangat substantif untuk mengetahui sektor ekonomi dan barang-barang berkualitas di Kabupaten Kapuas dalam bentuk penelitian. Dengan demikian, pembahasan penelitian ini dibatasi pada kajian sektor ekonomi unggulan dan komoditasnya pada Kabupaten Kapuas menggunakan cara analisis kuantitatif. Penelitian ini menggunakan beberapa kriteria untuk menentukan sektor ekonomi unggulan, di antaranya:

- Kontribusi dan pertumbuhan yang lebih sering ditonjolkan pada sektor ekonomi.
- Sektor ekonomi dasar ialah sektor ekonomi yang dapat mengisi penuh kebutuhan daerah sehingga sebagian sisanya bisa dijual atau diekspor pada daerah lain.
- Sektor ekonomi yang dilengkapi daya saing juga perkembangan yang kuat dalam kegiatan ekonomi.
- Sektor ekonomi yang berdampak dalam sektor lain sehingga sektor lain juga dapat berkembang.

Metode kuantitatif dengan indikator yang telah ditentukan dapat digunakan untuk menentukan sektor yang sesuai. Metode yang digunakan dalam kajian ini merupakan metode analisis *location quotient* (LQ) yang dipakai dalam penentuan sektor unggulan juga LQ untuk penentuan komoditas, analisis *shift-share*, juga analisis Tipologi Klassen. Untuk mendapatkan area yang lulus standard penelitian yang ditetapkan, standar tersebut dapat diturunkan dalam beberapa parameter, yaitu:

- Keikutsertaan juga laju pertumbuhan PDRB relative tinggi
- Diklasifikasikan sebagai sektor maju juga tumbuh cepat (sektor utama)
- Diklasifikasikan sebagai sektor dasar dengan nilai $LQ > 1$
- Merupakan sektor yang tumbuh sangat pesat dari departemen lain pada kabupaten terkait.
- Memiliki tanda positif (+) pada *overlay* dari seluruh alat analisis.

Sektor ekonomi yang akan diobservasi pada penelitian ini terbagi atas sembilan sektor ekonomi. Sembilan bidang yang kemudian dipelajari, ialah:

1. Pertanian, Kehutanan dengan Perikanan
2. Pertambangan dengan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dengan Air
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dengan Restoran
7. Transportasi, Pergudangan dengan Komunikasi
8. Keuangan, Perbankan dengan Jasa Perusahaan
9. Jasa lainnya